

Peran Organisasi Perempuan dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Perjuangan Pembentukan Negara Bangsa di Indonesia

The Role of Women's Organizations in the Struggle for Independence (Nationalist Movement) and the Struggle for Nation Building (Nationalism) in Indonesia

Mia Novitasari^{1 2} & Ani Widayani Soetjipto³

¹Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Indonesia

²Cakra Wikara Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia

³Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

mia.novitasari@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 21 Juli 2025, direvisi 21 September 2025, diputuskan diterima 28 September 2025

Abstract

In discussing the nation-state, Nira Yuval Davis' work provides an overview of how gender relations influence and are influenced by national projects and how women are positioned within them. The role and struggle of women's organizations before and at the beginning of Indonesia's independence can be seen from this analysis. This paper attempts to revisit the situation of the women's movement during Indonesia's independence. Does nationalism as an ideology domesticate or liberate women? Did the agenda of women's organizations during that period run parallel to the nationalist agenda, or did it merge with the priority agenda of achieving independence? This paper finds that gender influences and is influenced by Indonesia's national and nationalist projects through a discussion of various women's organizations that existed at that time. This includes efforts to suppress and silence progressive and critical women's movements of the time, including Gerwani, to prevent them from disrupting the political power structures of the era.

Keywords: women's organizations, independence struggle, Indonesian nationalism, Gerwani

Abstrak

Dalam bahasan mengenai negara bangsa, karya Nira Yuval Davis memberikan gambaran bagaimana relasi gender memengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek nasional serta bagaimana kedudukan perempuan di dalamnya. Peran dan perjuangan organisasi perempuan sebelum dan awal kemerdekaan Indonesia dapat terlihat dari analisis tersebut. Tulisan ini mencoba melihat kembali situasi gerakan perempuan dalam kemerdekaan Indonesia. Apakah nasionalisme sebagai ideologi yang mendomestikasi atau membebaskan perempuan? Apakah agenda perjuangan organisasi perempuan pada masa itu berjalan bersama dengan agenda nasionalisme atau lebur dengan agenda prioritas untuk meraih kemerdekaan? Melalui pembahasan terhadap berbagai organisasi perempuan yang ada pada masa itu, tulisan ini menemukan bahwa gender memengaruhi dan dipengaruhi oleh proyek kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Hal ini termasuk upaya penundukan dan pembungkaman gerakan perempuan progresif dan kritis pada masanya Gerwani agar tidak mengganggu kekuatan politik yang ada pada masa itu.

Kata kunci: organisasi perempuan, perjuangan kemerdekaan, nasionalisme Indonesia, Gerwani

Pendahuluan

Membahas mengenai gerakan perempuan perlu didahului oleh pembahasan mengenai sejarah, konsep bangsa, dan situasi politik yang melatarbelakanginya. Sejarah gerakan perempuan di Indonesia pada dasarnya dapat ditarik jauh sebelum kemerdekaan. Pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, organisasi kepemudaan berdiri sebagai wadah awal perjuangan melawan penjajah. Gerakan perempuan pada saat itu tidak hanya bicara soal proyek jangka pendek tetapi juga jangka panjang tentang kemajuan

perempuan secara keseluruhan. Gerakan perempuan termasuk yang kritis terhadap kehidupan bernegara. Ide-ide gerakan perempuan di masa lalu adalah ide yang radikal dan rasanya saat ini perlu menghidupkan hal itu kembali (Gina 2018). Riset *Jurnal Perempuan* yang membahas percakapan perempuan atau feminis tentang kebangsaan mengungkap bahwa perempuan selalu menjadi alat mobilisasi kebangsaan, meskipun perempuan memiliki kepentingan yang independen terhadap kebangsaan. Namun, kepentingan perempuan tersebut dipandang sebelah mata oleh aktor-aktor politik yang mengelola negara (Dhewy 2018).

Dalam menjelaskan mengenai mengapa perempuan cenderung ‘tersembunyi’ dari tatanan fenomena nasionalis, Yuval Davis merujuk Carole Pateman (1988) dan Grant (1991). Carole Pateman mempelajari teori-teori klasik tentang ‘kontrak sosial’ yang sangat berpengaruh dan telah meletakkan dasar bagi pemahaman tentang tatanan sosial dan politik Barat. Teori-teori ini membagi wilayah masyarakat sipil menjadi domain publik dan privat. Perempuan (dan keluarga) ditempatkan pada domain privat yang tidak dianggap relevan secara politik. Menurut Yuval Davis, nasionalisme dan bangsa dibahas sebagai bagian dari ranah politik publik. Pengucilan perempuan dari arena tersebut telah memengaruhi pengecualian mereka dari wacana tersebut (Davis 1997).

Bangsa dan nasionalisme merupakan istilah yang dapat diperdebatkan. Nasionalisme melibatkan identifikasi suatu kaum dengan suatu tempat dan komunitas yang disebut sebagai bangsa yang mereka merasakan rasa memiliki dan loyalitas serta memberikan hak dan kewajiban (Blackburn 2004). Nasionalisme di Dunia Ketiga bukan hanya sebuah gerakan melawan kolonialisme tetapi juga sebuah ideologi politik. Ia memperbaharui dirinya setelah kemerdekaan. Menurut Smith, untuk memberikan dasar dan rasional bagi unit dan institusi sosial dan politik yang baru. Perjuangan nasionalis anti-kolonial didasarkan pada anggapan dan harapan akan manfaat dan kemajuan ketika kedaulatan nasional dimenangkan. Membela dan mengembangkan negara-bangsa serta proses memimpikan yang terus berlanjut adalah kelanjutan dari perjuangan nasionalis (Martyn 2005).

Bagi sebagian besar negara di Asia Tenggara pada paruh pertama abad ke-20, berjuang untuk membebaskan tanah dan masyarakat tempat mereka tinggal dari kekuatan kolonial asing adalah sesuatu yang jelas dan patut untuk diperjuangkan. Bagi mereka, nasionalisme merupakan perjuangan untuk membebaskan bangsa dari dominasi asing dan mendirikan negara bangsa mereka sendiri. Indonesia telah menanamkan interpretasi tertentu mengenai gerakan nasionalis dengan menyeleksi pahlawan nasional secara hati-hati. Dalam hal ini, perempuan dipinggirkan. Ini telah merugikan pluralisme dari sebagian besar gerakan nasionalis dan peran perempuan di dalamnya (Blackburn 2004).

Perjuangan gerakan perempuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses kolonialisme yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai setelah

Indonesia merdeka pada 1945. Proses perjuangan melawan penjajahan masih berlangsung setelah kemerdekaan. Berbagai gerakan perlawanan dilakukan baik melalui jalan senjata maupun jalur diplomasi. Kedua jalur upaya perlawanan ini sebagai bagian dari gelombang nasionalisme menentang kolonialisme dan imperialisme yang juga terjadi di negara Asia lainnya. Pada masa memperjuangkan kemerdekaan, berbagai organisasi kebangsaan muncul, seperti Boedi Oetomo pada 1908, lalu Muhammadiyah yang bernuansa Islam pada 1917. Mereka memiliki cara masing-masing dalam melawan kekuasaan pemerintah kolonial pada masa itu. Selain itu, terdapat berbagai organisasi lainnya dengan beragam ideologi antara lain komunisme, sosialisme yang berjuang dengan cara bergerilya serta melalui gerakan bawah tanah (Subono 2018).

Untuk bisa melihat kembali sejarah perjuangan perempuan dalam kaitannya dengan kehidupan kebangsaan adalah dengan melihat dan mempelajari hasil-hasil kongres perempuan. Dalam kongres tersebut, para perempuan memperjuangkan banyak hal mulai dari pendidikan, kesejahteraan ibu dan anak, isu poligami, dan lainnya. Pada tahun 1930-an, awal terjadi pergerakan isu di dalam gerakan perempuan bahwa seluruh perjuangan perempuan masuk menjadi bagian dari gerakan nasionalisme untuk gerakan kemerdekaan (Gina 2018).

Pada sisi lain, sejarah perjuangan bangsa Indonesia masih minim mencatatkan peran perempuan maupun gerakan perempuan yang sama-sama berjuang untuk melawan imperialisme pada waktu itu. Setidaknya, terdapat dua hal terkait minimnya literasi perempuan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pertama, perempuan bukan berada dalam posisi pengambilan keputusan yang menentukan dalam proses-proses politik. Kedua, perkumpulan perempuan cenderung mengalah untuk tidak menampilkan diri pada lingkup perkumpulan laki-laki (Subono 2018, hlm. 147).

Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) pada 1950 dan 1960-an merupakan satu-satunya organisasi perempuan yang merambah pentas politik nasional, sementara organisasi lain berpendapat bahwa percaturan organisasi perempuan itu dibatasi arena sosial saja. Profil perempuan Gerwani yang bersuara keras dan militan dianggap mengancam laki-laki sebagai penjaga gawang nilai-nilai normatif. Ketakutan tersebut diterjemahkan oleh mitos penyiksaan yang digambarkan dilakukan oleh Gerwani pada peristiwa G30S 1965 (Rizal 2007).

Artikel ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana peran perempuan dan organisasi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia serta pembentukan negara bangsa (nasionalisme Indonesia)?; Apakah nasionalisme sebagai ideologi mendomestikasi atau membebaskan perempuan?; Apakah agenda perjuangan organisasi perempuan dan agenda kemerdekaan Indonesia dapat berjalan bersama atau agenda perempuan dikalahkan dengan prioritas kemerdekaan?

Kebaruan dari tulisan ini antara lain karena relevansinya dengan upaya penulisan ulang sejarah Indonesia oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan tengah melaksanakan penulisan ulang sejarah nasional. Ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025. Hal yang mendapat kritik tajam dari masyarakat sipil adalah dalam draf kerangka konsep penulisan tersebut sejumlah pelanggaran HAM berat tidak dimasukkan di dalamnya. Situasi ini semakin diperburuk dengan pernyataan klaim dari Menteri Kebudayaan, Fadli Zon bahwa tidak ada bukti kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan massal. Informasi tersebut menurutnya hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah. Hal ini memantik reaksi keras dari kalangan masyarakat sipil terutama aktivis dan organisasi perempuan yang menjadi bagian dalam penulisan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah pada tahun 1998 lalu (BBC News Indonesia 2025).

Situasi ini tidak dapat lagi dibiarkan berlalu begitu saja. Faktanya, bukan kali ini saja pemerintah berupaya menghilangkan fakta sejarah. Kasus Gerwani menjadi pengingat kita bersama bagaimana rezim yang berkuasa untuk kepentingan mereka menghilangkan fakta sejarah yang ada. Sampai sekarang mungkin belum banyak masyarakat yang sepenuhnya memahami dengan jernih apa yang sebenarnya terjadi dengan Gerwani dan bagaimana gerakan perempuan yang paling progresif tersebut ditundukkan dan dihancurkan oleh penguasa, untuk kepentingan mereka. Hal ini akan sangat berbahaya karena sejarah pada akhirnya hanya akan dijadikan legitimasi oleh rezim namun tidak pernah dijadikan arena pembelajaran yang berharga. Pengetahuan sejarah penting untuk dijadikan sebagai arena pembelajaran untuk menatap masa depan yang lebih baik.

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian feminis melalui studi dokumen penelusuran literatur yang menjadi rujukan utama para peneliti serta akademisi dalam kaitannya dengan pembahasan organisasi perempuan pada masa pra dan setelah kemerdekaan. Literatur penting dari Cora Vreede Stuers (1960), Saskia Wieringa (2002), Kumari Jayawardena (2016), Susan Blackburn (2004 & 2007), Elizabeth Martyn (2005), serta Nira Yuval Davis (1997) menjadi rujukan utama penulis dalam penyusunan tulisan ini. Membaca berbagai buku dan artikel yang ditulis oleh feminis memungkinkan untuk menemukan kesamaan dalam definisi tentang proses penelitian feminis. Setiap penelitian dianggap feminis mencakup dua tujuan utama, yaitu sensitivitas terhadap peran gender dalam masyarakat dan pengalaman yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta pendekatan kritis terhadap alur penelitian tentang masyarakat, struktur metodologi, dan epistemologi dalam 'pengetahuan' ditempatkan dalam domain publik (Letherby 2003). Literatur feminis sangat penting untuk dipakai dalam penyusunan tulisan ini guna mentriangulasi berbagai data yang disajikan.

Gerakan Perempuan Sebelum dan Setelah Kemerdekaan

Dalam memahami pergerakan dan perjuangan organisasi perempuan di Indonesia, penting terlebih dahulu melihat kiprah organisasi-organisasi yang muncul sejak awal kebangkitan nasional (pasca-1908) hingga masa awal kemerdekaan dan runtuhnya Orde Lama pada 1965. Penjelasan konteks periode ini membantu kita memahami dinamika politik serta fokus isu yang diperjuangkan perempuan saat itu. Tulisan ini akan menyoroti beberapa organisasi perempuan dari periode tersebut, dengan pembahasan yang lebih mendalam pada Gerwani (Gerakan Perempuan Indonesia)—organisasi yang paling progresif pada masa awal kemerdekaan—serta dinamika perjalanannya hingga akhirnya dihancurkan pada 1965.

Pada tahun 1912, asosiasi Putri Mardika didirikan di Jakarta dengan bantuan dari organisasi kepemudaan Budi Oetomo yang lebih dulu dibentuk pada tahun 1908. Tujuan utama pembentukan Putri Mardika adalah memberikan bantuan finansial kepada anak perempuan yang cerdas agar dapat memulai atau melanjutkan pendidikan mereka, menyediakan informasi serta nasihat bagi perempuan muda yang ingin belajar,

dan memberi ruang bagi perempuan yang cenderung pemalu untuk mulai berpartisipasi dalam kehidupan publik. Pada tahun-tahun berikutnya, muncul berbagai organisasi perempuan regional dan lokal, seperti Putri Boedi Sedjati (Gadis Sejati) dan Kegiatan Wanita Setia yang didirikan pada 1914 untuk meningkatkan peran perempuan melalui pelatihan akademis. Di Minangkabau, organisasi Keutamaan Istri bahkan mendirikan sekolah sebagai bagian dari upaya tersebut. Secara umum, organisasi-organisasi perempuan yang lahir antara 1913–1915 memiliki tujuan yang bersifat sosial, dengan fokus pada peningkatan peran perempuan melalui pendidikan, kelas menjahit, kursus kesejahteraan anak, dan kegiatan serupa. Periode ini juga ditandai oleh berdirinya organisasi berbasis keagamaan, seperti Aisyiyah dan Sarekat Islam (Stuers 1960).

Gerakan perempuan Indonesia pada awalnya berkembang dalam kerangka gerakan nasionalis. Ideologi gerakan pada awalnya dipengaruhi oleh cita-cita demokrasi liberal dan nilai-nilai Islam (Jayawardena 2016). Organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah terbentuk pada 1917. Aisyiyah dianggap mewakili kelompok kelas menengah yang posisinya antara kelompok 'ningrat' dan marhaen (proletar) (Stuers 1960). Kongres perempuan pertama tahun 1928, peserta dari kalangan organisasi Islam enggan bergabung dalam mengusung isu pembaruan terhadap perkawinan, termasuk juga Aisyiyah yang membela hukum perkawinan Islam. Masalah ini memecah wacana umum antara perempuan dan laki-laki sekuler dan yang religius. Organisasi berbasis Islam bersikap defensif dan menolak tuntutan dari kelompok sekuler yang menuntut perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan pada masa itu agar perempuan mendapatkan hak yang lebih banyak/adil (Blackburn 2007).

Sosialisme kemudian menjadi salah satu aliran dalam gerakan nasionalis yang semakin penting. Upaya awal gerakan perempuan terbatas pada advokasi hak suara dan perlawanan terhadap praktik poligami. Gerakan perempuan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perempuan memperoleh hak suaranya tetapi tidak mampu mendapatkan perubahan yang diinginkan dalam Undang-Undang Pernikahan. Poligami masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu (Jayawardena 2016).

Gerakan Perempuan Indonesia yang berkembang pada 1930-an terbagi menjadi dua aliran utama yang keduanya didominasi oleh perempuan kelas menengah. Isu-isu yang diusung adalah isu hukum

keluarga dan pendidikan. Para nasionalis laki-laki mendukung kedua kelompok tersebut dan cenderung berhati-hati dalam isu poligami serta keterlibatan politik terbuka dalam gerakan nasionalis. Pada tanggal 22 Desember 1928 dilaksanakan Kongres Perempuan Pertama di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 organisasi perempuan (Jayawardena 2016). Hasil terpenting dari kongres tersebut adalah berdirinya Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). Isu yang dibahas adalah isu-isu yang penting bagi perempuan kelas menengah, yaitu pendidikan dan hukum pernikahan. Kongres mengirimkan teks kepada pemerintah terkait tiga resolusi yang berisikan permintaan; pertama peningkatan jumlah sekolah khusus bagi perempuan. Kedua, penjelasan kepada perempuan mengenai praktik perceraian yang berlaku dan ketiga, penyediaan bantuan kepada perempuan kepala keluarga yatim piatu dari pegawai negeri sipil Indonesia (Jayawardena 2016 & Stuers 1960).

Gerakan yang lebih radikal muncul pada Oktober 1929 pada saat organisasi Putri Indonesia, divisi dari Organisasi Jong Java bersama dengan kelompok perempuan lainnya melaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh 1.000 orang yang 600 orangnya adalah perempuan. Pertemuan ini dilaksanakan di Bandung. Pendekatan yang radikal diambil terhadap isu-isu, seperti poligami, prostitusi, dan pendidikan perempuan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Soekarno yang mendorong perempuan untuk bergabung dengan perjuangan kelompok nasionalis. Suwarni Pringgodigdo yang memimpin pertemuan tersebut mendirikan Organisasi Istri Sedar di Bandung dan memulai sebuah *Jurnal Sedar* (Jayawardena 2016).

Masih dalam periode sebelum kemerdekaan, pasca kongres perempuan pertama pada 1932, organisasi Istri Sedar telah menjadi gerakan politik yang terbuka. Gerakan ini mendorong perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik, meningkatkan kondisi perempuan kelas pekerja, dan mendesak penerapan kebijakan pendidikan nasional (Jayawardena 2016). Selain itu, perempuan harus menaruh minat dan aktif dalam politik karena semangatnya pada saat itu adalah hanya dengan dapat bersatunya perempuan dan laki-laki, gerakan akan cukup kuat dalam upaya mewujudkan kesetaraan hak kepada rakyat Indonesia (Stuers 1960). Banyak anggota Istri Sedar adalah bagian dari Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pemimpinnya ditangkap pada tahun 1929. Istri Sedar sangat kritis terhadap kolonialisme Belanda. Istri Sedar juga berpartisipasi dalam kongres perempuan Asia di Lahore

dan melaksanakan Kongres Pertama di Jakarta. Resolusi dari kongres tersebut antara lain penyeruan untuk menghapus poligami (Jayawardena 2016).

Kongres umum perempuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20–24 Juli 1935. Kongres tersebut diputuskan beberapa hal yang kaitannya masih dalam payung besar semangat proyek nasionalisme. Tercatat isu feminis yang diusung seputar pendidikan saja yaitu komitmen untuk memberantas buta huruf yang tinggi pada perempuan. Perihal lainnya yang menjadi tindak lanjut kongres antara lain akan dibentuk Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yaitu sebuah badan yang menyelidiki hal yang dapat dilakukan dalam kaitan pekerjaan untuk perempuan. Selanjutnya, setiap asosiasi yang hadir berelasi juga dengan organisasi pemuda, mengadopsi nasionalisme, kegiatan sosial, dan netralitas agama sebagai prinsip dasar kongres (Stuers 1960).

Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia (1942–1945), gerakan perempuan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk berkembang. Terdapat hanya satu organisasi yang diperbolehkan ada yaitu Fudjinkai (asosiasi perempuan). Asosiasi ini mengadakan kursus untuk mengatasi buta huruf, membuat dapur umum, dan terlibat dalam pekerjaan sosial lainnya. Melalui berbagai kegiatan tersebut, perempuan dari kelas atas dan menengah berhubungan dekat dengan perempuan dari kelas bawah dan ikatan persahabatan terjalin kuat di antara mereka. Pada tahun 1945, para perempuan dengan siap siaga membantu para gerilyawan. Para perempuan mengorganisir diri menjadi tim perawat dan petugas penghubung. Mereka mengoperasikan dapur sup dan klinik keliling. Asosiasi perempuan yang paling dikenal dari periode ini adalah Perwari (Persatuan Wanita Negara Indonesia) (Stuers 1960).

Pada Desember 1945, dalam Kongres Perempuan pertama setelah kemerdekaan, Perwari dan berbagai asosiasi perempuan lainnya bersatu dan bergabung membentuk satu organisasi besar bernama Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Program yang diusung adalah “menjadi garis belakang membela kemerdekaan negara” (Stuers 1960). Pada periode ini, dapat dilihat bahwa organisasi perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk memperjuangkan isu feminis. Isu organisasi perempuan lebur menjadi isu nasionalisme dalam situasi melawan penjajahan Jepang.

Gerakan perempuan Indonesia pascakolonial tidak dapat dipahami tanpa menghargai komitmennya terhadap nasionalisme dan proyek nasionalis. Ini sangat penting dalam konteks negara berkembang ketika

negara tidak memiliki sumber daya atau pengaruh untuk memulai kontrol sosial atau mengubah hubungan gender. Perempuan perlu bekerja sama dengan negara untuk perubahan, mengadopsi konseptualisasi kewarganegaraan yang berfokus pada tanggung jawab untuk mengembangkan serta memperbaiki posisi perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum (Martyn 2005).

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) merupakan organisasi gabungan dari empat puluh lima kelompok perempuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, mereka mendukung gerilyawan, membentuk kelompok menjadi kelompok perawat, serta mengorganisir klinik dan dapur umum. Beberapa kelompok yang tergabung ini merupakan kelompok perempuan yang terkait dengan partai politik dan asosiasi perempuan independen serta perempuan dari berbagai profesi. Kowani memperjuangkan hak-hak hukum yang setara bagi perempuan dan sebagian besar hasil upaya mereka membentuk Konstitusi Indonesia yang dirumuskan pada tahun 1949 yang memberikan hak suara yang setara bagi perempuan (Jayawardena 2016). Kegiatan Kowani pada masa itu diarahkan untuk menyatukan dan mengonsolidasikan kekuatan dan potensi nasional. Perbedaan pendapat tentang masalah agama dan politik tidak pernah diangkat. Semua difokuskan pada membantu pemerintah untuk memperoleh kemerdekaan negara.

Organisasi keagamaan yang besar lainnya adalah Wanita Katolik. Organisasi ini awalnya merupakan bagian dari Partai Katolik. Pada Desember 1949, Kongres Komunitas Katolik Seluruh Indonesia membentuk kembali organisasi ini. Wanita Katolik berada pada garis terdepan dalam upaya memperkenalkan Undang-Undang Perkawinan monogami pada 1950-an. Fokus organisasi ini juga pada pekerjaan sosial utamanya untuk lingkup komunitas anggota Katolik. Organisasi ini juga mendirikan tempat penitipan anak, sekolah, dan kelompok studi keagamaan untuk perempuan (Wieringa 2002).

Perwari didirikan pada tahun 1945 sebagai organisasi perempuan yang sekuler yang berdasarkan Pancasila. Perwari berkomitmen terhadap isu sosial dan aktif di berbagai bidang tahun 1950-an. Organisasi ini memiliki sekolah, biro konsultasi, klinik ibu dan anak, serta asrama untuk siswi dan pekerja perempuan. Ketua organisasinya tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota organisasi politik mana pun. Namun, ada temuan bahwa beberapa anggota ‘disarankan’ oleh anggota laki-laki dari partai politik yang mereka ikut

(PNI, Pesindo) untuk bergabung dengan Perwari. Setelah kemerdekaan, keanggotaan Perwari berkurang. Mereka berpindah ke organisasi perempuan sayap partai politik dan organisasi perempuan seperti Gerwis. Tahun 1953 terjadi demonstrasi perempuan dan Perwari kembali menjadi organisasi yang paling vokal dan berpengaruh tetapi pada sisi lain organisasi tersebut sebenarnya semakin melemah (Wieringa 2002).

Tahun 1950-an menandai periode yang dinamis sekaligus semangat dalam aktivisme perempuan Indonesia. Organisasi perempuan Indonesia secara aktif terlibat dengan negara baru karena konteksnya pascakemerdekaan. Organisasi perempuan dalam periode ini memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun pemahaman tentang kewarganegaraan perempuan. Indonesia pada tahun 1950-an merupakan masa perubahan dan transisi politik. Masih dalam konteks awal kemerdekaan, perempuan Indonesia memiliki hak penuh dan setara berdasarkan konstitusi 1945 dan 1950. Gerakan pada masa itu bergulat dengan pertanyaan tentang bagaimana perempuan seharusnya menggunakan hak-hak tersebut, bagaimana seharusnya bertindak sebagai warga negara, dan bagaimana perempuan perempuan bertindak secara internasional sebagai anggota negara berdaulat. Agenda gerakan perempuan di tingkat nasional terus sejalan dengan nasionalisme dan terdapat tumpang tindih antara kepentingan gender dan kepentingan nasional (Martyn 2005).

Gerwani: Organisasi Perempuan Progresif Awal Kemerdekaan

Berdirinya Gerwani menandai babak baru perjuangan gerakan perempuan di Indonesia pascakemerdekaan. Organisasi ini awalnya berdiri dengan nama Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar) pada 4 Juni 1950 di Semarang dan kemudian berganti nama menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) pada Kongres tahun 1954 sebagai bagian dari upaya memperluas basis gerakan dan mempertegas orientasinya. Konteks berdirinya Gerwani juga tidak dapat dilepaskan dari situasi politik pada saat itu yang masih dipengaruhi ideologi komunis dan ketika Indonesia belum sepenuhnya merdeka dari penjajahan Belanda. Gerwis dibentuk oleh enam organisasi perempuan yang menggabungkan diri, yakni Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang; Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya; Istri Sedar dari Bandung; Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri; Wanita Madura dari Madura; dan Perjuangan Putri

Republik Indonesia dari Pasuruan. Para perempuan yang tergabung dalam organisasi ini berasal dari latar belakang sosial yang beragam, banyak yang berasal dari keluarga priyayi rendah tetapi memiliki keterlibatan yang sama dalam gerakan nasional. Ada pula yang telah berjuang dalam gerakan gerilya melawan Jepang dan Belanda, bahkan beberapa di antaranya terlibat dalam gerakan bawah tanah komunis (Wieringa 2002).

Sejak dibentuk tahun 1950 sampai dengan 1951, Gerwis terus mengembangkan cakupan organisasinya. Pada tahun 1952, organisasi Istri Buruh Kereta Api (persatuan istri pekerja kereta api) dengan sepuluh cabang dan 4.000 anggota bergabung ke Gerwis. Pada tahun 1953, sebuah organisasi terakhir ditambahkan yaitu Persatuan Wanita Indonesia (Perwin) di Manado Organisasi telah berkembang pesat dalam tahun-tahun antara kongres pertama dan kedua. Di Surabaya, Gerwis memiliki 40 cabang dengan 6.000 anggota; pada 1954 jumlah anggota meningkat menjadi sekitar 80.000 anggota. Hasil kongres Gerwani tahun 1954 adalah untuk menjadi gerakan yang massal dengan target memiliki satu juta anggota pada akhir 1955. Pada April 1955, tercatat terdapat 400.000 anggota. Pada tahun 1956, tercatat 565.147 anggota dan pada pertengahan 1956 terdapat 640.460 anggota. Pada Desember 1957, ketika kongres ketiga dilaksanakan, Gerwani mengklaim memiliki 663.740 anggota (Wieringa 2002). Meskipun kondisi ini belum mencapai target, tetapi secara pertumbuhan organisasi kondisi ini sangat signifikan.

Pada Kongres yang pertama (1951), diambil keputusan bahwa nama Gerwis berubah menjadi Gerwani tetapi nama baru tersebut akan berlaku pada kongres berikutnya di 1954. Kongres tahun 1954 menandai pergantian nama organisasi dari Gerwis menjadi Gerwani. Dalam kongres ini, terpilih Umi Sardjono menjadi ketua. Hal ini menandai pengaruh feminis masih lebih kuat dibandingkan dengan pengaruh partai (PKI). Terdapat pengaruh komunis yang cukup kuat di Gerwis pada masa itu. Latar belakangnya adalah ada keinginan kuat dari partai komunis untuk mendirikan organisasi perempuan yang bisa mereka kendalikan. Namun, pada sisi lain, anggota pendiri Gerwis pada dasarnya memiliki keinginan yang kuat untuk kemerdekaan nasional dan untuk mengakhiri praktik 'feodal' yang telah lama mengakar di masyarakat (Wieringa 2002).

Penjelasan mengenai semakin masifnya keanggotaan Gerwani dijelaskan oleh Wieringa. Gerwani memiliki daya tarik sendiri bagi perempuan muda yang berbakat untuk berkesempatan menjadi pemimpin tanpa

memandang latar belakang sosial mereka. Gerwis lebih disukai dibandingkan organisasi wanita lainnya karena organisasi lain terlalu enggan membahas isu politik. Organisasi lain cenderung membatasi diri dengan isu sosial semata seperti pendidikan. Organisasi lain kurang bersedia melawan pemerkosaan, poligami, dan pernikahan anak setiap harinya. Keanggotaan Gerwani terbuka untuk semua perempuan Indonesia berusia minimal 16 tahun (bisa lebih muda usianya jika sudah menikah). Banyak anggota Gerwani yang buta huruf sehingga anggota tidak perlu menandatangani atau mengisi formulir. Anggota juga boleh bergabung dengan organisasi lainnya misalnya dengan SOBSI atau organisasi perempuan lainnya (Wieringa 2002).

Pada organisasi perempuan lainnya, situasinya berbeda karena dalam Perwari misalnya dapat naik menjadi pimpinan organisasi hanya jika yang berasal dari pemimpin desa atau memiliki pendidikan yang baik biasanya dari kalangan elite/priyayi. Dalam hal ini, Gerwani membutuhkan banyak kader, terutama setelah memutuskan menjadi organisasi massa. Gerwani memberikan pelatihan kepada mereka yang menunjukkan potensi untuk mengembangkan keterampilan berorganisasi. Gerwani merekrut pemimpin dari kalangan perempuan biasa. Strategi ini efektif dan banyak perempuan masuk ke Gerwani karena mereka merasa organisasi ini satu-satunya yang bersedia membantu masalah praktis mereka (Wieringa 2002).

Penjangkauan massa menjadi kegiatan penting. Kegiatan utama dilakukan pada tingkatan rumah tangga. Kegiatan yang dilaksanakan, seperti arisan, membantu distribusi beras, hadir pada saat kelahiran bayi, membantu anak-anak penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat tempat penitipan anak di kampung yang diorganisir. Setiap orang bisa berkontribusi pada tempat tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, pada tingkatan desa bersama dengan Pemuda Rakyat, membantu memperbaiki rumah perempuan yang sudah tidak memiliki suami, menyelesaikan sengketa pernikahan, membantu menangani korban kekerasan dalam rumah tangga bahkan dapat membantu dalam mengurus proses perceraian istri (Wieringa 2002).

Isu Perempuan

Resolusi penting yang dihasilkan dari kongres kedua Gerwani pada 1954 adalah tuntutan terhadap undang-undang pernikahan yang lebih demokratis. Sementara resolusi lainnya adalah membahas pemilihan umum

(1955), keamanan nasional, dan protes terhadap eksperimen nuklir (Wieringa 2003, hlm. 153). Selain fokus terhadap isu-isu perjuangan perempuan di dalam negeri, Gerwani juga menaruh perhatian pada isu-isu strategis internasional antara lain penghapusan imperialisme atau penjajahan dan juga terkait dengan protes terhadap percobaan nuklir. Gerwani mengalihkan fokus isunya dari pernikahan ke perjuangan untuk hak buruh yang setara bagi perempuan dan tanggung jawab yang setara dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional penuh dan sosialisme. Dalam prosesnya, mereka mulai menganggap diri mereka memiliki analisis dan strategi yang lebih unggul dan karenanya sebagai penggerak utama gerakan perempuan (Wieringa 2002).

Gerwani jelas berkomitmen untuk meningkatkan nasib buruh perempuan. Gerwani memiliki pemahaman yang jelas tentang eksploitasi buruh berdasarkan Marxisme. Pada tahun 1955, Umi Sardjono sebagai pemimpin Gerwani menjelaskan bahwa organisasi tersebut memperjuangkan hak buruh perempuan. Mereka menuntut jaminan sosial dan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, adanya tempat penitipan anak, hak perempuan untuk promosi dan pelatihan, hak untuk menerima tunjangan keluarga. Gerwani juga memperjuangkan upah petani dan pedagang kecil, menyatakan bahwa mereka juga memerlukan tanah untuk mencari nafkah, kredit murah dari pemerintah, tempat tinggal, serta pajak yang ringan bagi petani dan pedagang kecil. Gerwani juga mengidentifikasi bahwa perempuan mengalami diskriminasi upah, sering kali tidak mendapatkan cuti hamil dan menstruasi. Perempuan cenderung tidak dipromosikan dan dipecat karena mereka berhenti bekerja setelah melahirkan, akibat kurangnya klinik, dan tempat penitipan anak. Perempuan petani menurut Gerwani bahkan tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Mereka juga mengalami diskriminasi upah dan sama sekali tidak memiliki jaminan sosial (Blackburn 2004).

Aktivis Gerwis juga terlibat dalam aksi pedesaan yang mendukung Barisan Tani Indonesia (BTI). Selain itu, pergerakan Gerwis di daerah juga terlihat dari kerja sama antara Gerwis dan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri). Ini sangat kuat di Sumatra karena dua per tiga dari pekerja perkebunannya adalah perempuan. Mereka bersama melaksanakan kampanye untuk mendidik perempuan di sana tentang hak-hak hukum mereka dan untuk membantu mereka dengan masalah ketenagakerjaan dan pernikahan. Mereka juga mendukung para pekerja perkebunan dalam

konfrontasi kekerasan yang terjadi ketika Pemerintah mulai mengusir mereka dari perkebunan (Wieringa 2002). Hal ini menunjukkan kuatnya pengaruh ideologi Marx-Sosialis dalam perjuangan Gerwani.

Secara internal, Gerwis juga melakukan kegiatan untuk masyarakat dan juga penguatan organisasi internal. Gerwis melaksanakan kursus literasi dan mendirikan taman kanak-kanak. Gerwis juga mencoba mengorganisir kursus kader namun hal ini ditunda karena alasan keuangan dan cabang-cabang lokal harus melatih kader mereka tanpa pedoman dari pusat. Permasalahan kesulitan keuangan ini juga memaksa organisasi untuk menghentikan publikasi buletin internal mereka (Wieringa 2002).

Selama masa persiapan untuk konferensi Gerwis pada Maret 1954, masalah mendesak yang dihadapi oleh para perempuan pekerja di perkebunan adalah hak-haknya yang belum dilaksanakan. Ini terkait dengan kebutuhan terhadap tempat penitipan anak, hak-hak perempuan termasuk pencabutan PP-19 dan perdamaian. Dalam periode ini juga, tekanan Partai untuk menjadikan Gerwani sebagai organisasi massa perempuan di bawah organisasi massa perempuan di bawah kendali partai semakin meningkat. Dalam upaya menjadi organisasi massa perempuan, organisasi tersebut menekankan isu lain yang sangat dirasakan oleh perempuan yaitu terkait dengan kebutuhan pokok. Hal ini yang utamanya membedakan mereka dari sebagian besar organisasi perempuan lainnya pada masa itu (Wieringa 2002).

Pengaruh Kekuatan Politik terhadap Gerwani dan Organisasi Perempuan Lainnya

Dalam perkembangannya, sejak kongres pertama tahun 1951, latar belakang pimpinan Gerwis kental dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Kelompok yang ingin Gerwis tetap independen didorong ke pinggir. Hasilnya, Trimurti kalah suara dan Suwanti menjadi Ketua Resolusi dari kongres ketiga Gerwani menunjukkan bahwa Gerwani semakin terlibat dalam kepentingan politik nasional dalam konteks Demokrasi Terpimpin. Situasi ini masih tetap berlangsung hingga kongres keempat dan terakhir. Retorika sosialis mulai mendominasi publikasi organisasi, terutama yang membahas tentang 'perjuangan heroik' melawan Belanda di Irian Barat (Wieringa 2002).

Pandangan politik Gerwani semakin sejalan dengan retorika populis Soekarno. Pada tahun 1959, Gerwani berjanji mendukung Manipol. Gerwani mulai mengutip

Presiden dalam rumusan tuntutanannya antara lain pada tahun 1960-an perayaan Hari Ibu ditandai dengan memberikan dukungan untuk Manipol sebagai prioritas tertingginya, diikuti dengan perdamaian, solidaritas internasional, dan persatuan. Pada tahun 1961, semakin jelas keberpihakan terhadap politik nasional yang menyerukan bahwa gerakan perempuan harus menjadi gerakan yang benar-benar revolusioner dan emansipasi harus dihubungkan dengan perjuangan melawan imperialisme (Wieringa 2002).

Perwari dan Gerwani sebagai dua organisasi besar pada masa awal kemerdekaan tidak berjalan pada jalur yang sama. Hubungan Perwari dan Gerwani makin memburuk setelah demonstrasi 1953 karena perihal pernikahan Presiden Soekarno dengan Hartini. Perwari merasa bahwa Gerwani selalu memprioritaskan politik partai, meskipun sebenarnya kedua organisasi ini sama-sama progresif perjuangannya (Wieringa 2002). Situasi ini menjelaskan bahwa setelah kemerdekaan dan berjalannya beragam proyek nasionalis, arah perjuangan organisasi perempuan kuat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang dominan pada saat itu. Hal ini mengakibatkan terhambatnya atau yang disebut dengan Yuval Davis sebagai tenggelamnya perempuan dalam kaitannya dengan proyek nasionalisme.

Setelah tahun 1959, pengaruh hegemoni Soekarno dan Demokrasi Terpimpin sangat dirasakan dalam gerakan perempuan. Gerwani menjadi organisasi perempuan yang paling dekat dengan Presiden dan memberikan pengaruh yang besar pada KWI/Kowani. Situasinya pada saat itu, organisasi-organisasi lainnya merasa terpaksa mengemas kegiatan mereka dipenuhi dengan istilah Nasakom, Manipol/Usdek, dan lainnya. Hal ini meningkatkan ketegangan antara Gerwani dan organisasi perempuan lainnya meskipun sebenarnya pada tingkat lokal kerja sama terus berlangsung (Wieringa 2002).

Pada periode 1961–1964, Kongres Wanita Indonesia (KWI) makin mendekat ke arah politik Presiden Soekarno. KWI memprioritaskan pada isu politik nasional sementara kepentingan perempuan yang semakin spesifik terpinggirkan. KWI sangat mendukung perjuangan pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1964, fokus kongresnya lebih berfokus pada reformasi agraria dan kondisi kerja. Padahal sebelumnya, pada tahun 1961, kongres KWI masih menyerukan terkait undang-undang pernikahan. Pada sisi lain, KWI masih tetap aktif juga memperkuat hubungan dengan kelompok GOW lokal, seperti mengadakan kursus, membentuk koperasi, mendirikan pusat untuk membantu pekerja

seks, dan memperluas kegiatan bantuan hukum (Wieringa 2002).

Kejatuhan rezim Soekarno (Orde Lama) juga berarti larangan terhadap Gerwani. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Gerwani resmi dibubarkan dan beberapa anggotanya dipenjarakan. Pada rezim Orde Baru, hanya organisasi yang sejalan dengan pemerintah yang bisa terus berkuasa (Blackburn 2004). Di bawah rezim pemerintahan Orde Baru, penindasan yang dilakukan terhadap Gerwani telah mengakhiri kemungkinan dalam beberapa dekade ke depan merekrut perempuan dari kalangan miskin untuk masuk ke dalam organisasi politik (Blackburn 2004). Pada masa itu, ribuan anggota Gerwani dibunuh dan ditangkap, dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun tanpa pengadilan. Rezim Orde Baru mengidentifikasi pengikut Gerwani sebagai menyimpang dengan dituduh terlibat dalam pembunuhan jenderal di Lubang Buaya kala itu (Blackburn 2004).

Pada periode 1955—1965, upaya untuk menekan organisasi perempuan yang dianggap vokal dilakukan. Salah satunya oleh elite militer yang tidak suka dengan berdirinya organisasi istri dari angkatan perang dan kepolisian. Awal mulanya, organisasi seperti Persit, Pia Ardhy Garini, Jalasenastri, Bhayangkari berdiri otonom dan strukturnya terpisah dari kedinasan angkatan bersenjata waktu itu. Organisasi ini memiliki agenda untuk memperjuangkan kepentingan perempuan khususnya bagi istri Angkatan Darat. Isu yang diusung oleh Persit misalnya kenaikan gaji bagi janda militer, antipoligini, dan perkawinan dini dalam penyusunan UU Perkawinan. Situasi ini tidak berlangsung lama karena pimpinan AD saat itu tidak menyukai Persit. Pada akhirnya, organisasi tersebut dibekukan dipaksa tunduk sikap politiknya berdasarkan doktrin militer. Nama Persit diubah menjadi Kartika Candra Kirana setelah disatukan ke dalam Angkatan Darat (Rahayu 2017).

Organisasi perempuan lainnya juga dipaksa tunduk dengan pemerintahan Orde Baru. Gerakan Wanita Sosialis yang berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) harus menghilangkan kata sosialis kemudian diganti dengan sejahtera. Hal ini dilakukan agar organisasi tersebut dapat bergabung lagi dengan Kongres Kowani pada masa awal Orde Baru. Selain itu, Wanita Marhaen, organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) juga baru diterima kembali dalam Kongres Kowani setelah mengubah namanya menjadi Persatuan Wanita Nasional (Perwanas) (Rahayu 2017). Situasi ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan harus

ditundukkan demi kepentingan kekuatan politik yang berkuasa pada waktu itu.

Analisis

Nira Yuval-Davis, dalam pembahasannya mengenai gender dan nasionalisme, menegaskan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan dari persoalan perempuan dan reproduksi biologis bangsa. Menurut Davis, agenda utama dari gerakan nasionalis kerap berpusat pada kontrol terhadap pernikahan dan reproduksi perempuan, karena perjuangan perempuan atas hak-hak reproduksinya telah menjadi inti dari gerakan feminis sejak awal kemunculannya. Hak perempuan untuk memilih apakah akan memiliki keturunan, berapa banyak, dan kapan, telah dipandang oleh banyak feminis sebagai *ukuran dasar* dari politik feminis. Namun, hingga dekade-dekade terakhir, sebagian besar diskusi mengenai hak reproduksi perempuan masih berfokus pada dampaknya terhadap perempuan sebagai individu — misalnya, bagaimana hak-hak tersebut memengaruhi kesehatan, peluang kerja dan mobilitas, serta kehidupan keluarga. Padahal, tekanan yang dialami perempuan untuk memiliki atau tidak memiliki keturunan sering kali berkaitan dengan posisinya sebagai anggota kolektif nasional, bukan semata sebagai individu, pekerja, atau istri (Davis, 1997).

Hal ini dapat membantu menjelaskan dalam konteks kekuasaan politik Orde Lama, salah satu kebijakan yang menjadi perdebatan adalah terkait dengan UU Pernikahan dan Poligami. Pembahasan ini menjadi mengemuka di kalangan organisasi perempuan kala itu yang menyebabkan posisi organisasi perempuan terbelah antara mendukung kebijakan ini dan juga menolaknya. Organisasi perempuan Islam misalnya, mendukung aturan tersebut karena dianggap masih sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sementara organisasi perempuan lainnya yang sekuler seperti Gerwani menolak keras terkait peraturan tersebut.

Yuval Davis membedakan tiga dimensi utama dari proyek nasionalis. Salah satu dimensi utama proyek nasionalis yang akan terkait dengan relasi gender adalah dimensi genealogis yang dibangun dari asal usul spesifik orang atau ras mereka. Mitos asal usul yang sama cenderung membangun visi 'bangsa' yang relatif homogen. Dimensi lainnya adalah dimensi kultural yaitu warisan simbolis terkait dengan bahasa, agama, kebiasaan, tradisi dibangun sebagai esensi dari bangsa. Selanjutnya adalah terkait dimensi kependudukan yang berfokus pada kewarganegaraan sebagai

penentu batas-batas antar bangsa dan oleh karena itu mengaitkannya langsung dengan konsep kedaulatan negara (Davis 1997).

Berbagai dimensi yang diungkapkan oleh Yuval Davis, penting dilihat dalam konteks perjuangan gerakan perempuan di Indonesia. Dimensi perjuangan organisasi perempuan di Indonesia tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang homogen mencerminkan perempuan bangsa ini. Perempuan dengan identitasnya yang beragam, sebagai istri, ibu, anak belum lagi perempuan dari tingkat pendidikan dan latar belakang pekerjaan yang berbeda itu semuanya mewarnai perjuangan gerakan perempuan Indonesia. Organisasi perempuan yang terbentuk tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan keragaman budayanya. Semangat yang diusung pada waktu pra kemerdekaan serupa, penekanannya pada memperjuangkan agar kehidupan perempuan bisa lebih baik terutama pada aspek kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang layak. Dalam hal ini, semangat nasionalisme masih sejalan dengan isu feminis yang diusung oleh gerakan perempuan pada saat itu.

Dalam hal relasi nasionalisme dan gender serta kaitannya dengan politik perempuan, Yuval Davis juga menjelaskan bahwa perempuan akan lebih memilih untuk berorganisasi secara mandiri dan dalam gerakan anti perang, anti militerisme sebagai keyakinan feminis mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih tegas dan tidak dibayangi oleh intimidasi laki-laki dalam organisasi gabungan dengan laki-laki misalnya. Mereka akan cenderung bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok dan organisasi laki-laki yang memiliki tujuan politik yang serupa. Selanjutnya, beberapa kelompok perempuan tersebut akan melihat perjuangan mereka sebagai ujung tombak dalam perjuangan melawan sistem sosial patriarkal yang didominasi oleh laki-laki dan kekerasan (Davis 1997).

Kondisi yang dijelaskan Davis ini juga dapat digunakan untuk memotret perjuangan organisasi perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan awal kemerdekaan. Perjuangan gerakan perempuan terutama pra kemerdekaan sebagai gerakan yang juga mengusung semangat nasionalisme, perjuangan gerakan perempuan pada periode 1908 sampai sebelum kemerdekaan terlihat bahwa organisasi perempuan lebih otonom, memperjuangkan peningkatan peran perempuan agar lebih berdaya secara sosial. Perjuangan organisasi yang ditempuh seperti yang disebut Davis sebagai anti-militerisme atau perjuangan melalui organisasi sipil/perdamaian. Pada masa itu, terdapat

peningkatan kesadaran akan pendidikan, banyak organisasi perempuan berdiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan peran perempuan di ranah publik tidak hanya semata peran perempuan di ranah privat/domestik yang menurut Yuval Davis perempuan dilekatkan dengan peran reproduksinya saja. Semangat nasionalisme masih dianggap sejalan dengan kepentingan perempuan pada saat itu walaupun pada tahun 1930-an organisasi perempuan yang berdiri mulai mengusung isu-isu yang progresif, seperti peningkatan kondisi kelas pekerja perempuan serta mendorong perempuan terlibat dalam politik.

Gerakan perempuan pra kemerdekaan dapat dikatakan masih minim intervensi dari elite politik dan kekuatan politik yang dominan. Ini karena organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat lebih terfokus pada melawan kekuasaan kolonial Belanda. Situasi ini tidak jauh berbeda dengan masa pendudukan Jepang, organisasi perempuan membawa semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Hal ini karena terbatasnya ruang gerak organisasi perempuan sehingga organisasi perempuan pada masa itu lebih berfokus pada mendukung upaya gerilya pejuang kemerdekaan dengan mendirikan dapur umum, terlibat sebagai perawat dalam medan peperangan. Perjuangan organisasi perempuan pada masa ini, perempuan melebur dan lebih mengutamakan isu nasionalisme sebagai bagian upaya memperoleh kemerdekaan sebagai upaya lepas dari kolonialisme.

Analisis lainnya terkait situasi organisasi perempuan pada masa itu dapat merujuk pada Elizabeth Martyn. Menurut Martyn, aktivisme perempuan tidak terjadi dalam isolasi (ruang hampa) dan perlu diperiksa kaitannya dengan proses politik, budaya dan institusi yang mengatur masyarakat. Sistem politik dan ideologi dominan dari suatu negara memengaruhi dan membatasi kemampuan perempuan untuk berorganisasi, menentukan kepentingan perempuan, dan sering kali menetapkan agenda. Mobilisasi perempuan pada gilirannya memengaruhi proses-proses ini dan berkontribusi pada pembentukan identitas (Martyn 2005).

Analisis Martyn ini dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan Gerwani misalnya. Aktivisme yang dilakukan oleh Gerwani bukan berangkat dari ruang hampa. Hal tersebut merupakan akumulasi berkelanjutan semangat perjuangan terhadap hak-hak perempuan pada masa awal kemerdekaan.

Terbentuknya Gerwani yang bermula dari bergabungnya 6 organisasi perempuan pada saat itu menunjukkan bahwa gerakan perempuan terus ingin merapatkan barisan dalam memperjuangkan agenda feminis yang diusung terkait kesetaraan upah, pendidikan yang layak bagi perempuan, serta penyediaan fasilitas tempat penitipan anak untuk mendukung perempuan berkiprah di ruang publik. Kegiatan yang dilakukan Gerwani juga masif sampai dengan pedesaan/akar rumput. Mereka bersama dengan serikat buruh di daerah memperjuangkan kesetaraan upah kehidupan yang layak bagi pekerja perempuan.

Militansi kader Gerwani juga dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan organisasi ini yang dapat merekrut puluhan bahkan ratusan ribu anggota hanya dalam kurun waktu beberapa tahun saja sejak dibentuknya. Dalam perkembangan organisasinya dari 1950—1950-an, isu yang diperjuangkan Gerwani juga mulai mengalami perubahan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh hadirnya pengaruh dari partai komunis pada saat itu, banyak anggota dan pimpinan Gerwani merupakan tokoh partai tersebut. Menjelang tahun 1965, pandangan politik Gerwani mulai semakin sejalan dengan presiden Soekarno yang mendukung Manipol (Manifesto Politik). Relasi Gerwani dengan organisasi lainnya juga semakin memburuk karena sikap Gerwani yang cenderung diam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh Soekarno pada masa itu. Berakhirnya kiprah Gerwani pada Oktober 1965 dengan pembubaran dan fitnah kejam yang disematkan pada organisasi tersebut oleh pemerintahan Orde Baru, menandai apa yang disebut oleh Martyn sebagai sistem politik dan ideologi dominan dari suatu negara memengaruhi dan membatasi kemampuan perempuan untuk berorganisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agenda perjuangan perempuan yang feminis sudah tidak sejalan dengan proyek nasionalisme bangsa, bahkan cenderung kontradiktif.

Situasi gerakan perempuan pada awal kemerdekaan mulai berubah orientasinya, tidak sama lagi seperti masa sebelum kemerdekaan. Hal yang perlu menjadi catatan juga pada saat itu sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari pengaruh imperialisme. Masih terdapat permasalahan pembebasan Irian Barat yang juga didukung organisasi perempuan yang besar pada masa itu seperti Gerwani. Pengaruh kekuatan politik sangat memengaruhi organisasi perempuan. Pada masa awal kemerdekaan ini, isu kepentingan perempuan tidak menjadi prioritas organisasi besar, seperti Perwari di tahun 1960-an, Gerwis di akhir-akhir

1964 malah makin menguat dan mendekat ke arah kekuatan politik pemerintah yang dominan. Penjelasan ini juga yang dapat mengantarkan pada kondisi penghancuran gerakan perempuan pada tahun 1965 dan pada pemerintahan Orde Baru. Pertarungan politik kekuasaan elite kekuatan politik negara terutama pada awal berkuasanya Orde Baru menjadikan organisasi perempuan sebagai korban, seperti halnya yang terjadi dengan penghancuran Gerwani, penundukan organisasi Perempuan Marhaen yang terafiliasi dengan PNI harus berganti nama menjadi Perwanas. Gerakan Wanita Sosialis yang terafiliasi dengan PSI menghilangkan kata sosialis dengan sejahtera. Ini dilakukan dengan tujuan membuat organisasi perempuan kehilangan daya kritis serta daya juang yang progresif dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

Penutup

Pembelajaran yang sangat berharga dapat diambil dari melihat kembali perjuangan organisasi perempuan pada masa pra dan awal kemerdekaan. Mereka pernah berjuang untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan. Perjuangan gerakan sebelum kemerdekaan mendapatkan tantangan berat dari situasi perlawanan melawan kolonialisme. Perjuangan organisasi perempuan yang mengusung isu feminis saat itu sejalan dengan kepentingan nasionalisme menundukkan imperialisme. Organisasi perempuan tumbuh dan bergerak mengusung isu feminis untuk mewujudkan kehidupan perempuan yang lebih baik, untuk memperjuangkan perempuan terlibat di ruang publik, mendapatkan kehidupan, pendidikan, serta pekerjaan yang layak. Perjuangan organisasi perempuan yang semakin progresif pada masa awal kemerdekaan tetap harus berhadapan dengan kepentingan elite politik. Banyak elite saat itu tidak menyukai organisasi perempuan yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Agenda nasionalisme pada masa ini tidak lagi sejalan dengan isu feminis yang diusung organisasi perempuan sebelumnya. Dalam perkembangannya, isu yang diperjuangkan oleh organisasi perempuan malah terkooptasi oleh kepentingan elite politik pada masa itu. Dampaknya, organisasi perempuan sendiri terpecah fokus isu perjuangannya dan digunakan sebagai alat kekuasaan bagi pemerintah saat itu.

Kondisi tersebut harus menjadi pengingat bagi kita semua saat ini bahwa pernah ada perjuangan yang sangat progresif dari gerakan perempuan. Perjuangan yang dilakukan pada ruang yang sangat terbatas dengan segala hambatannya tetapi tetap terus

bergulir. Rasanya api semangat perjuangan organisasi perempuan pada masa sebelum dan awal kemerdekaan perlu terus digaungkan, dituliskan untuk kemudian dapat dimaknai dan dirasakan sebagai bagian dari perjuangan untuk segenap bangsa Indonesia. Mengutip dari Yuval Davis dalam kaitannya dengan bangsa dan nasionalisme, perempuan bukan hanya sekedar masuk ke arena nasional (negara bangsa) tetapi mereka menjadi inti dari pembentukan dan reproduksi negara bangsa tersebut.

Daftar Pustaka

- BBC News Indonesia. 2025. *Fadli Zon Klaim Pemerkosaan dalam Kerusuhan Mei '98 'Rumor' dan 'Tak Ada Bukti', Aktivis Perempuan Sebut 'Manipulasi dan Pengaburan Sejarah'*. [online] 14 Juni. Tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gen0d3qr8o> [Diakses 27 September 2025].
- Blackburn, S. 2007. *Kongres Perempuan Pertama – Tinjauan Ulang*. Disunting oleh Monique Soesman. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Blackburn, S. 2004. *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Dhewy, A. 2018. "Perempuan dan Kebangsaan." *Jurnal Perempuan*, Vol. 23(3).
- Gina, A. 2018. "Karlina Supelli: Pemahaman Kesejarahan Gerakan Perempuan Penting dalam Memaknai Kebangsaan." *Jurnal Perempuan*, Vol. 23(3).
- Jayawardena, K. 2016. *Feminism and Nationalism in the Third World*. Verso.
- Letherby, G. 2003. *Feminist Research in Theory and Practice*. McGraw-Hill Education. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=290370>.
- Martyn, E. 2005. *The Women's Movement in Postcolonial Indonesia: Gender and Nation in a New Democracy*. Taylor & Francis Group, ProQuest Ebook Central, <https://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=180935>.
- Rahayu, R. I. 2017. "Domestikasi Vs Revolusionerisasi Politik Sebelum G30S." *Indoprogress*, <https://indoprogress.com/2017/10/domestikasi-vs-revolusionerisasi-politik-perempuan-sebelum-g30s/>.
- Rizal, J.J. 2007. "Jejak Perempuan Dalam Historiografi Indonesia" (edisi *Kami Punya Sejarah*). *Jurnal Perempuan*, No. 52.
- Subono, N. I. 2018. "Bangsa dan Gender." *Jurnal Perempuan*, Vol. 23(3).
- Vreede-De Stuers, C. 1960. *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements*. Mouton & Co, 's-Gravenhage.
- Wieringa, S. 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Yuval-Davis, N. 1997. *Gender and Nation*. Sage Publications.